

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Dasar Pemikiran

Penelitian mengenai sejarah perbankan pada awal kemerdekaan sudah cukup banyak dan berkembang. Namun, dominan lembaga yang diteliti adalah *De Javasche Bank* atau yang kita kenal sekarang Bank Indonesia (BI) dan masih sangat sedikit penelitian mengenai lembaga keuangan BRI. Padahal jika dilihat dari sejarahnya BRI merupakan lembaga keuangan pertama yang dimiliki Indonesia setelah Indonesia merdeka dan berperan dalam mempertahankan kedaulatan negara disektor ekonomi. Dibalik pendirian BRI ini terdapat kisah heroik seorang anak bangsa yang dapat dicontoh. Kondisi kemiskinan dan merosotnya kesejahteraan masyarakat khususnya di daerah pedesaan di pulau Jawa yang melatar belakangi lahirnya bank ini.

Penelitian semacam ini pernah dilakukan oleh Kurniawan Adi Wijayanto (2003) dalam skripsinya yang berjudul “Perkembangan Bank Rakyat (*Syiomini Ginko*) tahun 1942-1946”<sup>1</sup> yang menjelaskan peranan dan kinerja BRI sebagai suatu bank pengkreditan yang pada Kzaman pendudukan Jepang bernama *Syomin Ginko* dalam perekonomian dan perbankan Indonesia. Penulis juga mengulik lebih dalam mengenai permasalahan yang muncul akibat beredarnya lebih dari satu mata uang.

---

<sup>1</sup> Kurniawan Adi Wijayanto, *Perkembangan Bank Rakyat (Syiomini Ginko) tahun 1942 – 1946*, Skripsi yang tidak diterbitkan Fakultas Sastra dan Seni Rupa, (Solo: Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm.5

Penelitian juga pernah dilakukan oleh Puthut Apriyono dalam skripsinya yang berjudul “Dinamika Bank Rakyat Indonesia Pada Masa Orde Lama, (Kajian Sejarah Lembaga Pengkreditan Rakyat di Purwokerto)<sup>2</sup> dimana penulis mencoba merefleksikan masalah moneter dimasa orde lama yang dikaitkan dengan kebijakan-kebijakan politik Presiden Soekarno dan penulis menjelaskan mengenai perkembangan BRI pada masa orde lama. Namun, Penelitian mengenai Perkembangan BRI pada masa Revolusi di Purwokerto 1946-1950 belum ada. Sedangkan, penelitian ini penting untuk dilakukan sebab perjuangan mempertahankan kedaulatan suatu bangsa tidak hanya dapat dilihat melalui perlawanan fisik atau diplomasi saja tetapi dalam bidang ekonomi untuk memperbaiki sosial ekonomi suatu bangsa.

Kondisi bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan masih sangat buruk. Proses pergantian pemerintah dari kolonial ke Republik menimbulkan gejolak disemua aspek kehidupan bernegara. Atmosfer politik pada saat itu juga masih tidak menentu. Ancaman baik dari luar ataupun dari dalam negeri sewaktu-waktu dapat menggulingkan pemerintahan yang sah. Hal tersebut semakin memperparah kondisi bangsa Indonesia secara keseluruhan. Secara umum, pada waktu itu kemerdekaan belum memiliki dampak apapun terhadap kemakmuran bangsa.<sup>3</sup>K

<sup>2</sup> Puthut Apriyono, *Dinamika Bank Rakyat Indonesia Pada Masa Orde Lama (Kajian Sejarah Lembaga Pengkreditan Rakyat di Purwokerto)*, Skripsi yang tidak diterbitkan Fakultas Ilmu Budaya, (Solo: Universitas Sebelas Maret, 2015), hlm. 1

<sup>3</sup> M.C. Ricklefs., *Sejarah Indonesia Modern 1200 – 2004*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2007), hlm. 470

Begitu pula dengan kondisi ekonomi pada awal kemerdekaan dapat dikatakan mengalami kemandegan, baik secara mikro maupun makro.<sup>4</sup> Keadaan ekonomi Indonesia awal kemerdekaan juga masih sangat memprihatinkan. Pemerintahan waktu itu belum mampu mengendalikan perekonomian negara. Sektor industri perkebunan yang menjadi andalan utama ekspor pada masa Hindia Belanda mengalami kemunduran drastis. Sektor pertanian yang bertumpu pada tanaman padi yang sempat mengalami swasembada pada tahun 1940 menurun tajam. Proses pemulihan ekonomi yang berjalan sangat lambat, memicu terjadinya inflasi di Indonesia serta terjadinya bencana kekurangan pangan.<sup>5</sup>

Ekonomi Indonesia mengalami inflasi yang tinggi pada awal tahun 1946 dan rendahnya cadangan devisa negara. Tantangan dibidang ekonomi sangat berat baik dari segi produksi maupun perdagangan. Fokus pemerintahan dan rakyat Indonesia adalah mempertahankan kemerdekaan, maka pada masa Revolusi tidak ditemui kebijakan ekonomi yang berencana dan berjangka panjang.<sup>6</sup> Inflasi pada masa awal kemerdekaan tahun 1946 juga dipicu oleh beredarnya lebih dari satu mata uang. Pada waktu itu, pemerintah menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah RI yaitu mata uang pemerintah Indonesia, mata uang pemerintah Hindia Belanda dan mata uang Pendudukan Jepang. Pada saat yang bersamaan, sekutu yang telah menguasai kembali beberapa kota di Indonesia juga mengeluarkan uang *NICA*. Pada tanggal 6 Maret 1946, Panglima *AFNEI* Letnan

<sup>4</sup> Soedrajat Djiwandono, dkk, *Sejarah Bank Indonesia Periode I: 1945 – 1959*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2005) hlm. 5

<sup>5</sup> R. Z Leirissa, dkk, *Sejarah Perekonomian Indonesia*, (Yogyakarta: Ombak, 2012) hlm. 85

<sup>6</sup> *Op. Cit.*, R. Z Leirissa, dkk, hlm. 90

Jendral Sir Montagu Stopford mengumumkan berlakunya uang *NICA* di daerah - daerah yang diduduki Sekutu.<sup>7</sup>

Pengumuman yang dilakukan Sekutu pada 6 Maret 1946, mendapatkan kecaman dari pemerintah Indonesia yang menolak keberadaan uang *NICA* tersebut. Sekutu dianggap melanggar perjanjian karna sebelum kondisi politik yang stabil dan jelas dilarang mengeluarkan mata uang. Hingga akhirnya pemerintah pun mengeluarkan mata uangnya sendiri yang bernama Oeang Repoeblik Indonesia (ORI) di tahun yang sama di bulan Oktober. Baik Indonesia maupun Belanda menyadari bahwa sumber daya ekonomi penting untuk mendorong kegiatan. Bagi Indonesia, kemerdekaan juga berarti kemandirian dalam pengelolaan sumber daya ekonomi tanpa didikte oleh kekuatan asing, suatu cita-cita untuk menjadi tuan di negeri sendiri.<sup>8</sup>

Oeang Repoeblik Indonesia (ORI) dikeluarkan pemerintah Republik Indonesia secara resmi melalui maklumat presiden pada Oktober 1946,<sup>9</sup> sebagai alat penukar dan alat pembayaran yang sah, dan alat pengukur harga diseluruh wilayah yang secara *de facto* berada di bawah kekuasaan Negara Republik Indonesia, yaitu: Jawa, Madura dan Sumatra, kondisi Indonesia yang masih membingungkan mengenai banyaknya mata uang yang beredar pada saat itu. Namun, peredaran Oeang Repoeblik Indonesia tidak berjalan dengan lancar dan merata di wilayah *de facto* Indonesia dikarenakan pengakuan dan adanya ancaman dari Sekutu, sehingga Pemerintah memberikan otoritas kepada masing-masing

<sup>7</sup> *Op. Cit.*, Kurniawan A. W., hlm.6

<sup>8</sup> Mustika Zed, " Aspek Sosial Ekonomi Zaman Revolusi" dalam, *Indonesia dalam Arus Sejarah: Perang dan Revolusi*, Jilid 6, Taufik Abdullah dan A. B Lopian, ed., (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2012), hlm.318

<sup>9</sup> Arsip Makloemat Presiden Repoeblik Indonesia No. 344, 30 Oktober 1946

daerah untuk mencetak Oeang Repoeblik Indonesia Daerah (ORIDA). Sehingga mata uang yang berlaku pada saat itu semakin banyak bukan hanya uang Jepang, *NICA*, dan ORI tetapi juga ORIDA.

Kebingungan yang terjadi diawal kemerdekaan tahun 1946 mengenai banyaknya beredar mata uang di Indonesia mengakibatkan permasalahan dibidang ekonomi. Sehingga untuk mempercepat proses pemulihan ekonomi, Pemerintah RI mulai memberdayakan peran perbankan. Lembaga perbankan pada waktu itu bertugas untuk melaksanakan koordinasi dalam pengurusan bidang ekonomi dan keuangan.

Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai *banknote*.<sup>10</sup> Kata Bank berasal dari bahasa Italia *banco* yang berarti tempat penukaran uang. Bank juga dapat diartikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>11</sup>

Sejarah perbankan terus mengalami perkembangan dan keberadaannya dinilai cukup penting, termasuk bagi Indonesia sebagai negara yang baru merdeka ditahun 1945 yang membutuhkan lembaga perbankan untuk pengurusan ekonomi dan keuangan. Sehingga pada tanggal 22 Februari 1946 Pemerintah membentuk Bank Rakyat Indonesia (BRI). Pembentukan BRI berdasarkan Peraturan

<sup>10</sup> Hoggson, N. F., *Banking Through the Ages*, (New York: Dodd, Mead & Company, 1926), hlm. 5

<sup>11</sup> Dedy Takdir, *Manajemen Perbankan (Pendekatan Praktis)*, (Kendari: Unhalu Press, 2007), hlm.1

Pemerintah Nomor 1 Tahun 1946. Bank Rakyat Indonesia mempunyai tugas memberi pinjaman kepada rakyat, menerima tabungan, menjalankan pengkreditan seperti bank pada umumnya, dan usaha-usaha lain yang diserahkan oleh Pemerintah.<sup>12</sup>

Pada periode setelah kemerdekaan RI, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1946 Pasal 1 disebutkan bahwa BRI adalah sebagai Bank Pemerintah pertama di Republik Indonesia.<sup>13</sup> Selanjutnya dalam pasal 2 disebutkan bahwa wilayah kerja BRI adalah seluruh Indonesia.<sup>14</sup> Dengan demikian secara *de facto* maupun *de jure* BRI menjadi bank pemerintah pertama sebagai pelengkap negara Republik Indonesia. Setelah pendirian BRI sebagai bank pertama di Republik Indonesia yang salah satu tugasnya melaksanakan penukaran mata uang Jepang dengan mata uang ORI yang melibatkan kantor-kantor cabangnya. Pemerintah juga mengambil keputusan untuk mendirikan Bank Negara Indonesia (BNI) dengan bantuan dana dari BRI. Bank Negara Indonesia ini didirikan pada tanggal 5 Juli 1946 oleh Yayasan Pusat Bank Indonesia.<sup>15</sup> Berdasarkan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1946<sup>16</sup> tentang pembentukan BNI.

Bank Rakyat Indonesia merupakan kelanjutan dari bank Pribumi yang berdiri di Purwokerto tahun 1895 dengan nama "*Hulpen Spaar Bank Der*

<sup>12</sup> Roeshardjo B., *Pengerahan Dana – Dana dan Usaha Bank Lain – lain*, (Koleksi Museum BRI Purwokerto, 1992), hlm.3

<sup>13</sup> Arsip Nasional Republik Indonesia, *Arsip Sekretariat Negara RI No. 374*, Peratoeran Pemerintah No.1 Tahun 1946 tentang penetapan Bank Rakjat Indonesia sebagai Bank pemerintah

<sup>14</sup> *Ibid.*,

<sup>15</sup> Sri Margana dkk., *Keindonesiaan Dalam Uang: Sejarah Uang Kertas Indonesia 1945 – 1953*, (Jakarta: Meseum Bank Indonesia, 2018), hlm. 37

<sup>16</sup> Arsip Nasional Republik Indonesia, *Arsip Sekretariat Negara RI No.375*, Peratoeran Pemerintah No.2 Tahun 1946 tentang pembentoeakan BNI

*Inlandsche Bestuurs Ambtenaren*” atau “Bank Bantuan dan Tabungan Pegawai Pemerintahan Bangsa Indonesia” yang disebut juga waktu itu Bank Priyayi.<sup>17</sup> Kondisi perpolitikan di Indonesia mempengaruhi kebijakan dan peraturan yang dijalankan oleh bank pengkreditan ini mulai dari zaman kolonial Belanda, zaman pendudukan Jepang (*Syomin Ginko*), awal kemerdekaan Indonesia hingga eksis sampai sekarang dalam dunia perbankan di Indonesia. Perkembangan BRI di awal kemerdekaan atau masa Revolusi sangat menarik untuk diteliti, karena pada masa ini BRI sangat bergantung pada kebijakan pemerintah. Perubahan kebijakan, nama dan peran kerap kali terjadi. Bank yang merupakan Bank pertama pemerintah Indonesia ini memiliki dinamika sebagai lembaga perbankan di awal kemerdekaan tahun 1946 sampai 1950.

Bank yang dirintis oleh orang pribumi di Purwokerto ini berfungsi sebagai bank pengkreditan yang membantu dan memperhatikan rakyat kecil seperti petani, nelayan dan pengkrajin. Jenis bank ini sebetulnya dapat menjadi alat yang penting untuk membantu dan meningkatkan kesejahteraan lapisan terendah dari masyarakat, pemerataan pelayanan perbankan dan pemerataan pendapatan, baik di daerah pedesaan maupun di kota-kota.<sup>18</sup> Bagi perbaikan sosial ekonomi rakyat, lembaga keuangan seperti ini sangat diperlukan oleh masyarakat.<sup>19</sup>

Kondisi keuangan BRI pada masa permulaan kemerdekaan sebenarnya relatif baik. Disamping membantu pemerintah dalam masa perjuangan, BRI juga melayani masyarakat baik yang berpenghasilan tetap, masyarakat pedesaan, serta

<sup>17</sup>Pandu Suharto, *Sejarah Pendirian Bank Pengkreditan Rakyat*, (Jakarta: Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, 1988), hlm. 29

<sup>18</sup>Pandu, Suharto, *Peran, Masalah dan Prospek Bank Pengkreditan Rakyat*, (Jakarta: LPPI, 1991), hlm 2

<sup>19</sup>*Op. Cit.*, Pandu Suharto, hlm. 3

pengusaha menengah dan nasional meskipun dengan pelayanan yang masih sederhana.<sup>20</sup>

Namun, ditengah kondisi politik awal kemerdekaan yang belum stabil, BRI juga belum begitu signifikan dalam mendukung perekonomian negara. Kegiatan BRI bahkan sempat terhenti karena agresi militer Belanda pertama dan kedua pada tahun 1947 dan 1948. Kondisi politik Indonesia semakin diperparah dengan adanya pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948. Bank Rakyat Indonesia mulai aktif kembali menjalankan kegiatannya setelah perjanjian *Roem Royen* pada tahun 1949 dengan berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat.<sup>21</sup>

Perolehan kedaulatan serta pengakuan kemerdekaan bukan berarti permasalahan yang dihadapi Indonesia selesai, terutama dalam bidang ekonomi. Sejumlah persoalan antara lain kesejahteraan, perbaikan keadaan dan penciptaan struktur ekonomi nasional kembali muncul dalam bentuk yang lebih nyata untuk dapat segera diatasi. Pemikiran membangun suatu perekonomian nasional muncul kembali dan menempati agenda utama kabinet pemerintahan.<sup>22</sup>

Adapun hal lain yang mendorong penelitian ini yaitu sebagai bahan refleksi dan introspeksi diri, dengan mempelajari sejarah kita sebagai bangsa dapat melakukan refleksi dan introspeksi serta melihat keberhasilan dan kegagalan yang pernah terjadi. Sehingga kita dapat mempertahankan dan mengembangkan keberhasilan dan tidak mengulangi kegagalan dengan melakukan penyempurnaan.

<sup>20</sup> Museum BRI, *Lokakarya Guru Museum BRI*, "<http://brimuseum.blogspot.com/?m=1>," diakses pada 5 Mei 2019, Pukul 01:31 WIB.

<sup>21</sup> Bank Rakyat Indonesia (BRI), *Seratus Tahun Bank Rakyat Indonesia, 1895 – 1995*, (Jakarta: Humas PT BRI, 1995), hlm 37

<sup>22</sup> *Op. Cit.*, R.Z Leirissa dkk., hlm. 86

Fenomena yang tengah terjadi mengenai liberalisasi serta regulasi sektor perbankan di Indonesia dinilai mencederai cita-cita bangsa dengan mengizinkan kepemilikan hampir 99% pihak asing.<sup>23</sup> Dominasi ini membuat pihak asing mempunyai akses yang sangat kuat terhadap data dan jaringan perekonomian dalam negeri. Dampaknya, Indonesia semakin mudah dipenetrasi oleh pihak asing. Padahal diawal kemerdekaan, Indonesia menilai kemerdekaan juga berarti kemandirian dalam pengelolaan sumber daya ekonomi tanpa didikte oleh kekuatan asing guna menjadi tuan dinegeri sendiri. Jika keadaan demikian, sebaiknya pemerintah dan masyarakat merefleksikan diri dengan sejarah perbankan diawal kemerdekaan yang penuh gejolak dan perjuangan dalam membantu mempertahankan kedaulatan.

Sektor keuangan memegang peranan yang sangat signifikan dalam memicu pertumbuhan ekonomi suatu negara. Menurut Harrod Domar dalam teori pertumbuhan ekonomi menganggap bahwa modal harus dipakai secara efektif, karena pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh peranan pembentukan modal tersebut. Teori ini juga membahas tentang pendapatan nasional dan kesempatan kerja.<sup>24</sup> Seperti yang dijelaskan dalam teori tersebut mengenai peranan modal menjadi sangat vital dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi. Lembaga keuangan BRI merupakan salah satu bank pengkreditan yang memberikan pinjaman atau modal baik bagi kalangan menengah seperti pengusaha maupun bagi masyarakat kecil seperti petani. Dimana pinjaman

<sup>23</sup> Syamsul Hadi, dkk, *Kudeta Putih: Reformasi dan Pelembagaan Kepentingan Asing dalam Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Berdikari, 2012) hlm. 49

<sup>24</sup> Arsyad, *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, (Yogyakarta: BPFE, 1999), hlm. 64 - 69

tersebut dijadikan modal untuk meningkatkan kesejahteraan hidup, hal ini akan berdampak kepada pendapatan perkapita penduduk dan menunjang pendapatan nasional yang akan memicu pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sehingga dapat disimpulkan adanya hubungan kausalitas (sebab-akibat) yang signifikan antara pertumbuhan kredit (pinjaman) dengan pertumbuhan ekonomi. Melihat Pengaruh lembaga keuangan ini, baik bagi masyarakat kecil, menengah dan tingkat nasional membuat penulis tertarik untuk menelitinya.

Penelitian ini penting bagi pembelajaran sejarah selain menambah wawasan mengenai sejarah perjuangan bangsa Indonesia diawal kemerdekaan, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi mata kuliah Sejarah Sosial Ekonomi Indonesia. Serta, penelitian ini dapat dikaitkan ke dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) di sekolah mengenai materi strategi dan bentuk perjuangan bangsa Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Sekutu dan Belanda.

## **B. Pembatasan dan Perumusan Masalah**

Penelitian sejarah pada dasarnya ingin membangun suatu struktur tertentu yang menunjukkan fenomena tertentu. Oleh karena itu, penelitian tentang perkembangan BRI di Purwokerto pada masa Revolusi ini dibatasi baik secara temporal maupun spasial. Batasan temporal dalam penelitian adalah dari tahun 1946-1950. Pertimbangannya adalah pada tahun 1946 lembaga keuangan BRI ini ditetapkan sebagai bank pertama yang dimiliki Indonesia diawal kemerdekaan. Sedangkan tahun 1950 adalah ketika BRI yang sempat diduduki oleh Sekutu dikembalikan lagi ke pihak Indonesia. Sedangkan, batasan spasial dalam

penelitian ini adalah Purwokerto, Jawa Tengah. Pemilihan batasan spasial tersebut dikarenakanK, di Purwokerto inilah BRI berdiri atau lahir.

Adapun perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengapa *Syomin Ginko* pada masa pendudukan Jepang dinasionalisasi menjadi BRI oleh pemerintah Indonesia?
- b. Bagaimana perkembangan BRI setelah dinasionalisasi menjadi bank pemerintah pertama Indonesia (1946-1950)?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan perkembangan BRI pada masa Revolusi di Purwokerto (1946-1950). Sedangkan, kegunaan dari penelitian ini dapat dilihat dari dua sisi. Secara teoritik meskipun tidak melahirkan teori baru, tetapi diharapkan penelitian ini dapat memperkaya tema-tema kajian Sejarah Sosial dan Ekonomi, mengenai sejarah perbankan di Indonesia, sekaligus menambah pengetahuan mengenai sejarah awal kemerdekaan Indonesia yaitu mengenai kajian perjuangan kemerdekaan dalam bidang ekonomi. Dimana perjuangan selalu dikaitkan dengan perang dan diplomasi. Penulis ingin memperlihatkan sisi lain dengan perjuangan ekonomi.

Sedangkan secara praktis kegunaan penelitian ini adalah sebagai bahan yang dapat dijadikan masukan bagi lembaga keuangan lainnya untuk meningkatkan pelayanan terhadap umum terutama masyarakat menengah dan bawah. Jika melihat sumber yang digunakan dalam penelitian ini dominan berasal dari museum BRI yang berada di Purwokerto, diharapkan menarik para pembaca

untuk berkunjung ke sana melihat sumber dan bukti-bukti secara langsung serta bagi pendidik dapat mengoptimalkan pemanfaatan museum BRI ini sebagai sarana pembelajaran sejarah.

#### **D. Metode Penelitian dan Sumber Bahan**

Secara etimologi, metode adalah masalah yang menguraikan tentang cara-cara atau jalan, petunjuk pelaksanaan teknis.<sup>25</sup> Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah dengan menekankan studi kepustakaan. Metode sejarah adalah suatu metode yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lalu lisan maupun tulisan dan merekonstruksikan secara imajinatif masa lalu berdasarkan data yang diperoleh.<sup>26</sup> Sejarah juga terkait pada penalaran yang bersandar pada fakta (kebenaran sejarah) yang terletak pada kesediaan sejarawan untuk meneliti sumber sejarah secara tuntas sehingga diharapkan dapat mengungkapkan sejarah secara objektif. Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan tahapan-tahapan penulisan sesuai yang dikemukakan oleh Louis Gottschalk<sup>27</sup>, sebagai berikut:

##### **a. Heuristik**

Heuristik dapat diartikan sebagai pencarian atau pengumpulan sumber-sumber sejarah. Penelitian ini berusaha mencari sumber-sumber yang berkaitan dengan sejarah Bank Rakyat Indonesia di Purwokerto dengan kurun waktu

<sup>25</sup> Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), hlm. 635

<sup>26</sup> Sartono Kartokirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, (Jakarta: PT Gramedia, 1992), hlm. 2

<sup>27</sup> Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, (Jakarta: UI Press, 2006) hal. 32

1946-1950 atau kita kenal pada masa Revolusi. Sumber yang dapat digunakan berupa sumber primer dan sumber sekunder.

Sumber primer adalah kesaksian daripada seorang saksi dengan mata kepala sendiri atau saksi dengan pancaindera yang lain, atau dengan alat mekanis seperti diktafon, yakni orang atau alat yang hadir pada peristiwa yang diceritakannya (disini selanjutnya secara singkat disebut saksi pandangan-mata).<sup>28</sup> Adapun, sumber primer yang digunakan:

- ARSIP Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 1946 tentang penetapan Bank Rakyat Indonesia sebagai Bank Pemerintah pertama pasca kemerdekaan.

Adapun sumber primer dalam bentuk surat kabar, antara lain:

- Surat Kabar Bataviaasch Nieuwsblad, "*De Vader van het Lanbouwcrediet*" (Bapak Kredit Pertanian), Senin 15 Maret 1909.
- Warta BRI tahun 1982 mengenai Akta Pendirian Bank Priyayi Purwokerto. Serta sumber-sumber lainnya yang dapat dilihat dalam daftar pustaka.

Sedangkan, sumber sekunder merupakan kesaksian daripada siapapun yang bukan merupakan saksi pandangan-mata, yakni dari seseorang yang tidak hadir pada peristiwa yang dikisahkannya.<sup>29</sup> Sumber sekunder yang digunakan penulis berupa buku-buku pendukung tema penelitian ini, baik buku mengenai sejarah BRI masa Revolusi maupun mengenai metode penelitian sejarah.

<sup>28</sup> *Op., Cit* Louis Gottschalk, hlm. 43

<sup>29</sup> *Ibid.,*

Kajian pustaka yang penulis gunakan dapat dari beberapa tempat sebagai berikut: Arsip Nasional Republik Indonesia, Museum Bank Indonesia, Meseum Bank Rakyat Indonesia, Yayasan Raden Aria Wirjaatmadja, Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta, Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial, Ruang Baca Prodi Pendidikan Sejarah UNJ, Perpustakaan Universitas Indonesia, Perpustakaan Universitas Sebelas Maret.

Penelitian ini juga melakukan wawancara dengan keluarga dari Raden Aria Wirjaatmadja yang sekaligus menjadi pengurus Yayasan Wirjaatmadja yaitu Bapak Poerwito, untuk melengkapi informasi yang kurang jelas dari suatu dokumen dan sekaligus menjadi uji kebenaran dan keabsahan data.

#### **b. Kritik Sumber (Verifikasi)**

Setelah mengetahui secara persis topik dan sumber, tahap berikutnya ialah Verifikasi, atau kritik sejarah atau keabsahan sumber. Verifikasi itu ada dua macam yaitu melakukan kritik ekstern (otentisitas) dan kritik intern (kredibilitas).<sup>30</sup> Kritik sumber bertujuan untuk mencari otentisitas atau keaslian data-data yang diperoleh melalui kritik intern dan ekstern.<sup>31</sup> Kritik ekstern bertujuan untuk mengetahui keaslian sumber yang meliputi penelitian terhadap sumber, tanggal, waktu dan siapa pembuat/ pengarangnya. Sedangkan, kritik intern, bertujuan untuk melihat dan meneliti kebenaran isi sumber dan dokumen sejarah yang meliputi kebenaran isi sumber atau dokumen sejarah.

<sup>30</sup> *Op. Cit.*, Louis Gottschalk, hlm. 95 - 112

<sup>31</sup> Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 58

Di dalam penelitian ini perlu menyeleksi data-data yang berhubungan dengan sejarah BRI. Seperti Arsip yang saya temukan di ANRI dan Perpustakaan Nasional, maka kritik ekstern untuk membuktikan keaslian sumber pada sumber arsip relatif tidak diragukan lagi. Kritik ekstern saya lakukan untuk sumber-sumber yang saya gunakan seperti surat kabar dan buku dengan memperhatikan tanggal, waktu dan siapa pembuat/pengarangnya.

Selain itu, peneliti membuktikan kredibilitas sumber melalui kritik intern (apakah sumber yang digunakan dapat dipercaya) dengan melakukan analisis hubungan kausalitas antara peristiwa sebelum dan sesudah, apakah sesuai atau tidak. Kemudian meneliti tulisan atau ejaan, bahasa dan gaya penulisan yang digunakan pengarang. Setelah menggunakan dua kritik tersebut, penulis mendapatkan fakta-fakta sejarah.

### **c. Interpretasi**

Interpretasi atau disebut penafsiran, setelah menyeleksi sejauh mana kebenaran, keabsahan suatu data. Maka, data yang terpilih dirangkai menjadi kesatuan yang harmonis. Di dalam penelitian ini penulis berusaha menghubungkan data-data yang telah diseleksi dan dirangkai menjadi suatu rangkaian peristiwa. Menurut Dilthey, interpretasi berarti *hermeneutics* dan *verstehen* yaitu: menafsirkan dan mengerti.<sup>32</sup> Interpretasi yang dilakukan dengan membandingkan sumber yang terdapat di Arsip Nasional Indonesia (ANRI) dengan beberapa surat kabar yang beredar pada saat itu dan buku yang berhubungan dengan tema tersebut. Penulis juga melakukan *verstehen* dengan

---

<sup>32</sup> Kuntowijoyo, *Penjelasan Sejarah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008), hlm. 3

cara memahami dan mengerti “makna dalam” dari berdirinya lembaga keuangan BRI, dengan merujuk pada arti dibalik pendirian BRI bagi kehidupan. Kemudian, penulis juga mencoba meletakkan diri, menghayati kompleks makna emosi nilai yang ada, tanpa menghilangkan sisi objektivitas dari penelitian.

#### **d. Penulisan Sejarah (Historiografi)**

Historiografi adalah tahap terakhir dalam metode penelitian sejarah. Historiografi dapat diartikan rekonstruksi yang imajinasi daripada masa lampau berdasarkan data yang diperoleh dengan menempuh berbagai proses.<sup>33</sup> Historiografi juga sering disebut penulisan sejarah. Penelitian ini disajikan menggunakan deskriptif naratif, yaitu penulisan sejarah yang disusun berdasarkan kronologis peristiwa dengan memperhatikan sebab-akibat (kausasi) pada peristiwa. Menurut Kuntowijoyo, sejarah naratif dapat dikemukakan melalui 3 syarat, yaitu: *collegation*, *plot*, dan struktur sejarah.<sup>34</sup>

*Collegation* ditempuh dengan mencari *iner connection* (hubungan dalam) antar peristiwa sejarah. Kemudian melakukan *Plot*, yaitu cara mengorganisasikan fakta-fakta menjadi satu keutuhan dengan interpretasi dan eksplanasi. Setelah tercapai, kemudian penulis mengorganisasikannya, sehingga menjadi sebuah rekonstruksi peristiwa sejarah

<sup>33</sup> *Op. Cit.*, Louis Gottschalk, hlm. 39

<sup>34</sup> *Op. Cit.*, Kuntowijoyo, hlm. 147